



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYAIFUL
2. Jabatan : DIREKTUR SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN
3. NHK : 130233

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	5.010.175.000
1. Tanah Seluas 366 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.370.670.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 299 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , Rp. 2.310.905.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 118 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 737.650.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 350 m2/80 m2 di KAB / KOTA BANGKALAN, HASIL SENDIRI Rp. 590.950.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	443.000.000
1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000		
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000		
3. MOBIL, HONDA HR-V Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 239.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.110.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.794.003.169
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	11.357.178.169



III. HUTANG

Rp.

48.231.912

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

11.308.946.257

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.